

Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana

Dari Halaman 1

dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran untuk membantu korban bencana.

"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak

pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar Teungku Faisal.

Prabowo Perintahkan Segera Bangun Hunian

Dari Halaman 1

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," kata Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana.

Dalam foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Syafruddin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendiktikantek Brian Yulianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Selain itu, Prabowo juga meminta pemenuhan

kebutuhan dasar para pengungsi. Prabowo meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," ujar dia.

Teddy mengatakan pertemuan tersebut turut dibahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi liburan akhir tahun, termasuk stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya," ujar Teddy.

BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Minggu, 14 Desember 2025. Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhamadi mengatakan jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yaitu 1.006 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025. (tem/jp)

Banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi telah menyebabkan 1.022 orang tewas. Bencana tersebut berdampak di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi hingga menyebabkan lebih dari 600 ribu orang masih menjadi pengungsi. (det/jp)

KLH Periksa 8 Korporasi di Sumut

Dari Halaman 1

"Langkah ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan mengenai aktivitas operasional yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir, sekaligus memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengutip Antara, Senin (15/12).

Ia menekankan, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan masyarakat.

Hanif menekankan pemanggilan tersebut bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya intensif untuk meminta keterangan manajemen, memverifikasi seluruh dokumen perizinan lingkungan, dan memastikan kepatuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dijalankan.

Menurut data resmi KLH, delapan perusahaan yang dipanggil untuk memberikan penjelasan adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Dalam proses awal, KLH/BPLH menemukan sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan.

Beberapa temuan awal menunjukkan adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan di luar batasan persetujuan lingkungan, kegagalan perusahaan dalam menjaga areal konsesi dari

perusahaan

perusahaan